



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2013

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2010

Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, bahwa untuk dapat

menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib

mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Kepala Daerah atau

Pejabat yang ditunjuk. Undang-undang ini menjadi acuan bagi pemerintah

khususnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang, Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang dan Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Malang untuk melaksanakan tugasnya. Penerapan undang-undang ini

dilakukan dalam bentuk pengawasan terhadap pendirian guest house.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ini hanya dapat melakukan tindakan

administrasi yang berupa penerbitan izin usaha, monitoring dan evaluasi.

Sedangkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang hanya

memberikan surat rekomendasi atas usaha yang dibuat oleh pemilik guest

house.

2. Adapun hambatan yang dialami adalah kurangnya informasi serta

data lapangan mengenai guest house yang memiliki izin atau tidak.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang hanya menunggu

pemilik usaha untuk melaporkan kegiatan usaha yang dilakukannya. Selain

itu kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait membuat kurang

efektif terhadap upaya-upaya yang dilakukan. Sosialisasi terkait dengan Perizinan Guest House yang telah dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang adalah cara melakukan pengawasan usaha terkait dengan guest house. Melakukan sosialisasi kepada pemilik guest house di Kota Malang untuk melakukan pendaftaran usaha dan menjelaskan hal-hal apa saja yang terjadi apabila tidak melakukan pendaftaran usaha merupakan upaya dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

3. Untuk sanksi merupakan kewenangan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja. Instansi tersebut lebih berperan terhadap tindakan administrasi, yaitu berupa teguran tertulis, Pembatasan kegiatan usaha, Pembekuan sementara kegiatan usaha bahkan sampai pencabutan izin kegiatan usaha.

B. SARAN

1. Untuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, disarankan dalam melakukan pengawasan harus lebih ketat agar tidak ada lagi pelanggaran terhadap izin pendirian guest house dan melakukan koordinasi dengan instansi khususnya Satuan Polisi Pamong Praja terkait agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian antara instansi terkait.

2. Untuk Satuan Polisi Pamong Praja juga disarankan melakukan koordinasi dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu agar Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu dapat melakukan pendataan terhadap guest house yang tidak memiliki izin.

3. Untuk Para pelaku usaha guest house sebaiknya mendaftarkan usahanya kepada instansi terkait agar tidak menimbulkan suatu kejadian yang tidak diinginkan oleh para pengusaha tersebut.

